

URGENSI MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SEBAGAI SEBUAH BANGSA

Wendy Anugrah Octavian

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: wendy_wao@yahoo.com

Abstract: *Pancasila values must be known, understood, and implemented by the nation of Indonesia in daily life to be able to realize the goal of realizing the proclamation of independence. However, in the present knowledge, understanding of the next generation of the nation against the values that are contained in the Pancasila, the more degraded and eroded by the battle of the new values that are not in accordance with the nation's identity. The problem of understanding resulted in the start of abandoned and forgotten Pancasila. Therefore, the implementation required values of Pancasila in order to be referable to the people of Indonesia in answering the various question facing current and future, both issues that come from within and from outside. before the success of the implementation we do the values of Pancasila, Pancasila, alienation from the real life of the nation of Indonesia..*

Keyword: **Implementation of Pancasila Values**

Abstrak: Nilai-nilai Pancasila haruslah diketahui, dipahami, dan diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Namun, pada saat ini pengetahuan, pemahaman generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Permasalahan pemahaman ini mengakibatkan mulai ditinggalkan dan dilupakan Pancasila. Oleh sebab itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kata Kunci: **Implementasi Nilai-nilai Pancasila**

PENDAHULUAN

Pancasila Sebagai dasar negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu.

Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Globalisasi dan euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong.

Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional setiap jaman dan era kepemimpinan, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang

dihadapi bangsa. Di satu sisi, trauma generasi muda terhadap sikap politik pemerintahan orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sementara disisi lain, era globalisasi beserta implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa dan negara, tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992:16). Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan

mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992:16).

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Lebih

dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu (Latif, 2011: 47). Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya.

Makna Yang Terkandung Pada Nilai-nilai Dalam Pancasila

Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan), yaitu:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “roh” sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama.

Pancasila dengan sila pertamanya, adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai Insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan pemerintahnya guna meningkatkan kesalehan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah berkah dari Allah, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagaman semestinya tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi. Sebagai umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah semestinya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan

kemuliaan dalam diri, sehingga meningkatkan moral bangsa.

Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Nilai Kemanusiaan)

Nilai yang terkandung dari sila kedua pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia kasus, korupsi, diskriminasi dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal, dapat teratasi.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, yaitu:

Indonesia adalah Negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari sila persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada haruslah dilakukan oleh pemerintah tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, maupun agamanya. Warga negara dalam semangat kebersamaan seharusnya melakukan tindakan yang tetap menunjukkan sikap dan perbuatan yang NKRI untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus dijaga agar NKRI tetap eksis, dan

dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis.

Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yaitu:

Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung Sila keempat pancasila adalah pedoman berdemokrasi Indonesia. Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi.

Bagaimana dasar demokrasi khas Indonesia, dikemukakan oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno berpidato, "... Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, „satu untuk semua“, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah per-musyawaratan perwakilan" (Amin Arjoso ed. 2002, hal 25 dalam Oetama, dkk). Dengan kata lain demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan praktik politik di Indonesia belum mengutamakan permusyawaratan untuk mufakat. Sebaliknya, tren baru yang berkembang pada saat ini mengarah pada demokrasi transaksional. Uang menjadi kekuatan dalam menguasai politik, kelompok yang memiliki uang yang berlimpah yang akan menguasai dan memenangkan perpolitikan. Inilah yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memberikan negara kepada kendali suatu kelompok tertentu.

Kondisi ini akan diperparah apabila demokrasi ekonomi, dan sosial tidak dilakukan, dan pemimpin yang visioner tidak dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang gagasan demokrasi sesungguhnya sesuai dengan amanat sila ke empat pancasila.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu:

Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warganegara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin, maupun jabatan. Semua warganegara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan bukan keuangan dan jabatan, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan, dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai kepentingan. Itulah prinsip keadilan yang terkandung dalam sila ke-lima. Namun sesungguhnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya dapat membuat masyarakat leluasa bermusyawarah dan bermufakat mencari solusi persoalan. Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmurannya yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya keadilan dapat membuat setiap orang tenang beribadah tanpa harus merasa terancam oleh kelompok lain yang berbeda keyakinan.

PENUTUP

Merefleksi makna dari kemerdekaan yang mana Indonesia telah merdeka selama 74 tahun, perlulah kiranya kita renungkan kembali telah sampai dimanakah perjalanan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka. Kenyataannya pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, tidak dapat dengan leluasa mengekspresikan kecintaannya kepada Tuhannya, pemimpin dan beserta aparat negara sering tidak memperdulikan penderitaan rakyat, dan pelaksanaan hukum masih sering berpihak kepada yang membayar, bukan kepada yang benar. Pancasila yang selalu dinaungkan sebagai dasar dan falsafah bangsa, serta menjadi fondasi kehidupan kenyataannya lebih sering menjadi hiasan untuk mempercantik negara. Jika ini yang terjadi berarti kita belum mampu mengetahui, memahami, dan ikut serta mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita tentang hidup bersama sebagai bangsa.

Untuk dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kehidupan kita sehari-hari. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.

Oetama , Jakob, dkk. *Rindu Pancasila*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara